

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM RESI GUDANG PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUBANG

Yayat Sudrajat¹⁾ * Indra Kristian¹⁾

Universitas Subang, Indonesia¹⁾ Universitas
Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia²⁾
Email: yayatunsub67@gmail.com *

Article History

Received: 6 March 2023

Accepted: 20 March 2023

Published: 3 April 2023

Abstract

The general problem of agriculture in Indonesia is the fall in prices during the main harvest season. Farmers cannot store their crops longer because they have run out of funds and do not have adequate warehouses. This condition is exploited by middlemen and moneylenders to make big profits, so that the farmers feel disadvantaged. Some of the reasons farmers sell their crops to middlemen are because middlemen are able to transport and take care of harvesting and transporting themselves. The buying process by middlemen for farmers is fairly cheap and the loyal customers of farmers are middlemen so whenever it's harvest time, farmers still entrust their sales to middlemen. The government then tried to overcome these problems through the establishment of a Commodity Auction Market, a People's Business Credit, and a Warehouse Receipt System, hereinafter referred to as a Warehouse Receipt System (SRG).

Keywords: Agriculture, Farmers, Harvest, Warehouse Receipt System.

Abstrak

Permasalahan umum pertanian di Indonesia adalah jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Para petani tidak dapat menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak punya gudang yang memadai. Kondisi ini dimanfaatkan para tengkulak dan rentenir untuk mengambil untung besar, sehingga para petani merasa dirugikan. Beberapa alasan petani menjual hasil panen ke tengkulak karena tengkulak mampu mengangkut dan mengurus sendiri pemanenan hingga pengangkutan. Proses pembelian yang dilakukan tengkulak pada petani terbilang sangat murah dan pelanggan setia petani adalah tengkulak, sehingga kapan pun masa panennya petani tetap mempercayakan penjualannya pada tengkulak. Permasalahan tersebut oleh pemerintah kemudian dicoba diatasi melalui pendirian Pasar Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang atau Warehouse Receipt System selanjutnya disebut dengan Sistem Resi Gudang (SRG).

Kata kunci: Hail Panen, Pertanian, Petani, Sistem Resi Gudang.

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan

ARTIKEL

berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah yang mana masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang kondusif dalam menghadapi persaingan yang semakin sulit.

Permasalahan umum pertanian di Indonesia adalah jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Para petani tidak dapat menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak punya gudang yang memadai. Kondisi ini dimanfaatkan para tengkulak dan rentenir untuk mengambil untung besar, sehingga para petani merasa dirugikan (Iswi Haryani & DP, 2024). Beberapa alasan petani menjual hasil panen ke tengkulak karena tengkulak mampu mengangkut dan mengurus sendiri pemanenan hingga pengangkutan. Proses pembelian yang dilakukan tengkulak pada petani terbilang sangat murah dan pelanggan setia petani adalah tengkulak, sehingga kapan pun masa panennya petani tetap mempercayakan penjualannya pada tengkulak (Wika et al., 2022). Permasalahan tersebut oleh pemerintah kemudian dicoba diatasi melalui pendirian Pasar Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang atau *Warehouse Receipt System* selanjutnya disebut dengan SISTEM RESI GUDANG (SRG).

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu instrumen penting yang efektif dalam system pembiayaan perdagangan, serta Sistem Resi Gudang (SRG) ini dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang (SRG) juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun (Aprilia et al., 2023).

B. KAJIAN PUSTAKA

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui apakah tujuan kebijakan telah dirumuskan tersebut dapat tercapai atau tidak maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. (Winarno, 2007). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu tujuan atau sasaran yang diinginkan. (Sudrajat, Y; Kristian, I; 2022).

Dye dalam (Nugroho, 2006) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil apa yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda”. Sementara Laswell dalam (Nugroho, 2006) mendefinisikan kebijakan publik “sebagai program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai dan praktik-praktik tertentu”. Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa kebijakan publik merupakan suatu yang dikerjakan oleh pemerintah sebagai program yang ditujukan untuk tujuan nilai-nilai dan praktik-praktik tertentu. kebijakan publik adalah keseluruhan aktivitas pemerintah baik dilakukan sendiri maupun melalui berbagai badan yang lain, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat, dengan kata lain kebijakan publik ditempatkan sebagai “pengatur” dalam masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan

ARTIKEL

langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Menurut Carl I. Friedrich dalam (Nugroho, 2006) pengertian implementasi kebijakan adalah : “Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Selanjutnya (Dunn,2003) mengemukakan bahwa : “Implementasi kebijakan, berarti pelaksanaan dan pengendalian arah dan tindakan kebijaksanaan sampai dicapainya hasil kebijaksanaan, Implementasi kebijaksanaan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijaksanaan, yang pada dasarnya bersifat teoritis”. Berdasarkan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik dapat dikatakan suatu keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik, mempunyai tujuan, rencana dan program dilaksanakan secara jelas dalam bentuk aturan- aturan maupun undang-undang baik oleh pemerintah, lembaga non pemerintah atau oleh orang, atau kelompok orang, dirumuskan dan dianalisis oleh ahli kebijakan, di implementasikan oleh aktor sesuai prosedur untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan dan terus dievaluasi sepanjang pelaksanaannya.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam sistem dan kehidupan kerja organisasi pemerintah.(Sudrajat & Kristian, 2022) Dalam hal penelitian ini penulis mengungkapkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan sebenarnya dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi yaitu efektivitas dan efisiensi bidang pengelolaan hasil panen petani dengan pemakain implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Pemda Kabupaten Subang. Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena berbasis pada informasi/kenyataan yang terjadi di lapangan (Fauzi, 2023).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Skema Sistem Resi Gudang

Dimulai dari petani, atau kelompok tani, koperasi atau UKM atau pelaku usaha, mendatangi gudang yang ditunjuk dengan membawa komoditi yang akan diresigudangkan. Lembaga Penilaian Kesesuaian akan menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang : nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis, sifat, jumlah, mutu, kelas barang, jangka waktu mutu barang dan tanda tangan yang berwenang. Sementara itu Pengelola Gudang akan membuat Perjanjian Pengelolaan Barang, yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Pengelola Gudang juga akan menerbitkan Resi Gudang (setelah menerima kode registrasi dari Pusat Registrasi) yang berisi informasi tentang : judul Resi Gudang, nama pemilik, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya simpan, nilai barang serta harga pasar (Fahmi et al., 2024).

Pengelola Gudang menyampaikan informasi tersebut pada Pusat Registrasi dan seluruh data dan informasi dalam Resi Gudang ini ditatausahakan oleh Pusat Registrasi. Pengelola

Gudang juga akan memberi tahu semua informasi tersebut pada Badan Pengawas. Jika semua proses ini telah dilakukan, Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang bisa diterima petani/pelaku usaha untuk segera diuangkan pada lembaga pembiayaan bank atau non-bank yang ditunjuk. Resi Gudang ini juga bisa disimpan sebagai sebuah aset, atau diperdagangkan/diperjualbelikan.



Gambar 1. Alur penerbitan, penjaminan dan penyelesaian transaksi serta Resi Gudang

Bagi petani dan pelaku usaha informasi harga komoditi berperan penting untuk mengetahui dan memproyeksikan kapan waktu yang tepat untuk menyimpan dan menjual, sedangkan bagi lembaga keuangan untuk membantu menentukan besarnya nilai pinjaman yang dapat diberikan (Haditana et al., 2020). Informasi harga ini dapat diakses melalui internet dengan alamat <http://infoharga.bappebti.go.id>. Idealnya, sistem informasi dalam Sistem Resi Gudang terintegrasi di semua pihak-pihak yang terkait, secara online dan real time di mana setiap Pengelola Gudang dilengkapi dengan perangkat sistem terhubung secara online ke Pusat Registrasi dengan sistem komputer, basis data local, komunikasi melalui dial-up, leased lines, VPN, atau internet. Sementara Pusat Registrasi menyediakan sistem dan jaringan informasi yang terhubung dengan stakeholders SRG (Pengelola Gudang, LPK, Penguji Mutu, Asuransi, Perbankan BAPPEBTI) untuk menata-usahakan Resi Gudang (verifikasi, konfirmasi, registrasi, pengamanan, query, *early warning system*).

Standar Sasaran Kebijakan

Implementasi Kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Standar/ukuran dalam suatu kebijakan sangat diperlukan, agar kebijakan tersebut ketika diimplementasikan tidak akan kabur dari tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Begitupun dengan kejelasan dan konsistensi standar/ukuran dan sasaran kebijakan juga sangat diperlukan agar tidak terjadi multitafsir bagi penerima kebijakan (Yuliah, 2020). Sedangkan sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dari kebijakan tersebut dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Implementasi kebijakan Sistem Resi Gudang menentukan sasaran target penerbitan resi gudang perperiodenya selama satu tahun sekali. Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang sendiri memiliki sasaran atau tujuan yang hendak dan ingin dicapai yaitu meningkatnya tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Subang (Khaulani et al., 2020).

Standar/ukuran dan sasaran kebijakan sudah jelas adanya dan aturannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan UU No.9 Tahun 2006 tentang SRG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013, agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha terutama petani maka sebaiknya Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kab. Subang

ARTIKEL

melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terutama petani mengenai Peraturan Pemerintah tersebut. Dikarenakan masih ada sebagian pelaku usaha terutama petani yang hanya mengetahui dan memahami apa itu Sistem Resi Gudang. Seperti yang dikatakan salah satu petani bahwa sosialisasi mengenai Sistem Resi Gudang kurang optimal, karena masih hanya terfokus pada satu wilayah (Fiandi, 2023).

standar/ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal dalam penetapan target penerbitan resi gudang di Kabupaten Subang. Inilah sebabnya penetapan target harus realistis sesuai dengan potensi yang ada sehingga tujuan kebijakan Sistem Resi Gudang ini bisa optimal. Padahal jika realisasi resi gudang benar-benar sudah sesuai dengan potensi yang sudah ada maka target yang ditetapkan pemerintah juga seharusnya dapat melebihi yang selama ini ditetapkan dan disesuaikan dengan potensi yang sudah ada.

Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Hom (Rusli, 2015:105) mengenai standar/ukuran dan sasaran kebijakan yaitu kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan sistem resi gudang terlalu ideal untuk dilaksanakan di level kelompok sasaran (pelaku usaha terutama petani), maka agak sulit merealisasikan kebijakan sistem resi gudang tersebut hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Dengan begitu implementasi kebijakan sistem resi gudang di Kabupaten Subang belum optimal dalam sasaran kebijakannya.

Menurut teori dari Mazmanian dan Sabatier mengenai kejelasan dan konsistensi tujuan (Rusli, 2015: 108-109) bahwa adanya kejelasan isi dan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu implementasi kebijakan, menentukan sasaran atau tujuan (waktu tercapainya dan jumlah sasaran yang tercapai sesuai rencana), dalam menentukan target yang realistis. Menurut teori dari Weimer dan Aidan (Pasolong, 2010:59) bahwa logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan adanya kepastian hukum dan adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya. Jadi kejelasan dari standar/ukuran dan sasaran kebijakan sistem resi gudang sangat diperlukan agar mudah dipaharni oleh sasaran kebijakan yaitu pelaku usaha terutama petani dan agar tujuan dari kebijakan sistem resi gudang bisa tercapai sesuai target yang sudah ditetapkan pemerintah.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang harus ada dalam pelaksanaan implementasi kebijakan terdiri dari sumber daya manusia (SDA). Sumber dana atau anggaran dan fasilitas sarana dan prasarana. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, Jika tidak ada sumber daya yang memadai maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan sistem resi gudang pada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang dikatakan sudah optimal atau belum dapat diukur dengan indikator kuantitas dan kualitas SDM, ketepatan alokasi sumber dana dan ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia saat ini di Kabupaten Subang belum mencukupi dari segi kuantitas untuk memenuhi dan menunjang pelaksanaan kebijakan sistem resi gudang di Kabupaten Subang. Serta jumlah pengelola gudang dan gudang SRG itu sendiri yang tidak sebanding dengan jumlah wilayah kebijakan tentu akan mempengaruhi kelancaran implementasi kebijakan sistem resi gudang di Kabupaten Subang. Maka perlu ada tambahan

ARTIKEL

pengelola gudang dan gudang SRG di Kabupaten Subang. Jika dilihat dari segi kualitasnya Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang sudah cukup baik dengan terus mengupayakan SDM yang ada seoptimal mungkin dengan melakukan latihan-latihan agar menghasilkan pengelola gudang yang komitmen dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Hom (dalam Rusli, 2015:105) bahwa sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan sumber daya manusia, biaya, dan waktu untuk melaksanakan program atau kebijakan untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik dan dapat menjelaskan nilai yang efisien. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam implementasi kebijakan sistem resi gudang pada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang belum berjalan optimal dari segi Sumber daya.

Implementasi kebijakan bisa dilaksanakan dengan optimal, jika apa yang menjadi standar tujuan kebijakan dipahami oleh para individu yang bertanggungjawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan (Rochaeni, 2023). Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan sistem resi gudang yang optimal sangat ditentukan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan standar dan tujuan kebijakan, disamping itu koordinasi juga membantu mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan (Kristian, 2023).

Komunikasi antar organisasi implementasi kebijakan sistem resi gudang pada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang dikatakan sudah optimal atau belum bila dapat diukur dengan indikator koordinasi dan sosialisasi antar organisasi. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pengelola gudang sudah mengerti dengan tupoksinya masing-masing sehingga dalam melaksanakan tugas pun berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan atasan juga penuh tanggungjawab. Disamping itu, semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian juga sebaliknya. Koordinasi bisa dikatakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam melakukan kegiatan yang berbeda-beda agar berjalan optimal sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal, termasuk kerjasama antara Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan implementasi kebijakan sistem resi gudang di Kabupaten Subang yaitu dengan Bank BJB dan BAPPEBTI. Tanpa adanya koordinasi yang baik, maka kemungkinan masing-masing orang tersebut akan bekerja sendiri-sendiri yang tentunya tidak menutup kemungkinan mengakibatkan suatu hambatan terhadap usaha-usaha pencapaian tujuan instansi.

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengabaikan jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dan pembagian wewenang yang baik (Utami, 2021).

E. SIMPULAN

<http://jurnaldialektika.com/>

Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia

P-ISSN: 1412-9736

E-ISSN: 2828-545X

ARTIKEL

Implementasi kebijakan Sistem Resi Gudang pada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang belum optimal berdasarkan konsep kebijakan yang diperkenalkan oleh Van Meter dan Van Horn. Maka berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis mengenai Implementasi kebijakan Sistem Resi Gudang pada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Standar/Ukuran dan Sasaran Kebijakan. Standar/Ukuran dan Sasaran Kebijakan belum optimal karena kurang tepat dalam penetapan target penerbitan resi gudang terlalu ideal sehingga tujuan kebijakan sistem resi gudang belum tercapai karena realisasi penerbitan resi gudang tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Sumber Daya, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun Sumber dana di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian belum optimal. Komunikasi antar Organisasi, komunikasi antar organisasi pelaksana dilihat dari komunikasi dan koordinasi di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian sudah berjalan dengan baik, juga antara Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian dengan pihak-pihak terkait yaitu BAPPEBTI dan Bank BJB. Karakteristik Agen Pelaksana, karakteristik agen pelaksana dalam implementasi Kebijakan Sistem Resi Gudang di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang sudah optimal. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik di Kabupaten Subang cukup kondusif dalam mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan sistem resi gudang pada dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Disposisi implementator, sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan sistem resi gudang menunjukkan sikap positif dan mendukung berjalannya pelaksanaan implementasi kebijakan sistem resi gudang di Kabupaten Subang ini.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin, 2004. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. AG
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
- Aprilia, A., Anggara, R., Kusbiantoro, A. F., & Witardi, R. J. (2023). Perkembangan Sistem Resi Gudang Di Indonesia Dan India. *Diponegoro Private Law Review*, 8(1), 82-96.
- Badan Pusat Statistik, 2020, Kabupaten Subang Dalam Angka 2020, BPS Kabupaten Subang
- Burhan, Bungin, Prof, Dr, H, M, S.Sos, M.Si, 2007, Penelitian Kualitatif, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Dunn, William N, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Terjemahan Edisi ke-III, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Fahmi, I. A., Afriyatna, S., Batubara, M. M., Abubakar, R., & Rahmantia, N. (2024). Sistem Resi Gudang Kopi Pada Koperasi Mandiri MAI: Implementasi dan Permasalahannya Coffee Warehouse Receipt System at the MAI Independent Producer Cooperative: Implementation and Problems. *Journal of Global Sustainable Agriculture*, 4(2), 124-130.
- Fauzi, A. N. (2023). Meningkatkan Partisipasi Petani dalam Sistem Resi Gudang.
- Fiandi, A. (2023). Implementasi standar mutu dan sasaran mutu pada lembaga pendidikan. *EduTeach: Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran*, 4(1), 34-40.
- Hadinata, S., & Marianti, M. M. (2020). Analisis Dampak Hilirisasi Industri Kakao di Indonesia: Kata Kunci: Kakao, Rantai Nilai, Hilirisasi Industri, and Value Added. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 99-108.
- Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media. Yogyakarta.

ARTIKEL

- Iswi Hariyani, S. H. M. H., & DP, I. R. S. (2024). Resi Gudang: Sebagai Jaminan redit dan Alat Perdagangan. Sinar Grafika.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*. 21(2). 88-89
- Kristian, I; Pancasila dan Kewarganegaraan Alfabeta 2019
- Kristian I, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. *Jurnal Dinamika* Vol 9, No 1 (2022) 23-37
- LAN RI. 1999. Pengukuran Kinerja Suatu Tinjauan Terhadap Instansi Pemerintah. Jakarta : LAN RI Press
- Nugroho, Riant, D 2006, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Cetakan Kedua, Jakarta: PT EMK Gramedia. Subarsono, AG, 2006, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Pasolong, Harbani. 2009. Teori Administrasi Publik. Bandung. Alfabeta
- Rochaeni, A. (2023). Interpretasi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 8-17.
- Rusli, Budiman. 2015. Kebijakan Publik. Bandung, CV. ADOYA Mitra Sejahtera
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta
- Utami, Y. P. (2021). Implementasi program pemberian beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lamandau. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 1-12.
- Wika, A., Endang, L., & Ema, P. (2022). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Petani Kopi Menjual Ke Tengkulak Di Desa Sinar Marga Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan (Doctoral Dissertation, Universitas Baturaja).
- Y Sudrajat, I Kristian, Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang- Komitmen: *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2022 3 (2), 116-127
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.